

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Secara umum Aceh Jaya merupakan Kabupaten dengan Kategori non IHK (Indeks Harga Konsumen) yang pada triwulan ini sebesar 2,44 % dimana nilai perhitungan inflasinya tertumpu pada Meulaboh, Aceh Barat dengan nilai inflasi pada triwulan IV 2025 sebesar 2,44 % Month to Month (M-to-M), 5,56 % Year to date (Y-to-D), 5,56 % Year on Year (Y-on-Y) dimana inflasi Year-on-Year (Y-on-Y) tertinggi dan terendah di Provinsi Aceh yaitu Meulaboh 5,56 %, Aceh Tengah 8,90 %, Lhokseumawe 5,56 %. Komoditas Penyumbang Utama andil inflasi (m-to-m,%) adalah nasi dengan lauk 0,24 %, cabe merah 0,37 %, bawang merah 0,18 %, ikan Cakalang/ikan sisek 0,16 %, Tomat 0,14 %. Penyumbang Utama andil inflasi (y-to-y,%) emas perhiasan 1,55 %, beras 0,34 %, nasi dengan lauk 0,30 %, sigaret kretek Tangan (SKT) 0,25 %. Penyumbang utama Inflasi triwulan ini adalah berasal dari kelompok pangan yaitu Nasi dengan lauk 0,24 %, emas perhiasan 1,55 %, . Komoditas yang paling berpengaruh Adalah emas perhiasan, cabai merah, beras, sigaret kretek tangan dan bawang merah. kenaikan sejumlah kelompok pengeluaran di Kabupaten Aceh Jaya ini didukung suasana momen Maulid Nabi Muhammad Saw 1447 H.

Kelompok Penyediaan Bahan Pokok yang mengalami inflasi.

Inflasi pada kelompok ini bersumber dari peningkatan cabe merah, beras, dan bawang merah, cabai merah, sigaret kretek tangan.

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya secara bulanan mengalami inflasi.

Komoditas yang mengalami inflasi pada kelompok ini ialah emas perhiasan. Inflasi lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga parfum, pasta gigi, dan bedak.

Pada bulan Desember 2025 Kabupaten Aceh Jaya tercatat masih

1. Volatilitas Harga Komoditas Pangan Strategis

Komoditas yang paling bergejolak pada Triwulan IV di Aceh:

- Cabai merah dan cabai rawit
- Bawang merah
- Beras (peralihan masa panen)
- Daging ayam ras dan telur

Harga sangat sensitif terhadap ketersediaan pasokan dan cuaca.

2. Lonjakan Permintaan Menjelang Akhir Tahun

1. Peningkatan konsumsi rumah tangga menjelang:
 - Akhir tahun
 - Kegiatan sosial dan keagamaan lokal
2. Walaupun Natal tidak dominan, efek nasional Nataru tetap berdampak pada jalur distribusi dan harga di Aceh.

Keterbatasan Cadangan Pangan Daerah

3.

- Cadangan pangan pemerintah daerah relatif terbatas.
- Ketergantungan tinggi pada Bulog dan pasokan luar daerah.
- Peran BUMD pangan dalam stabilisasi harga belum optimal

4. Perilaku Pasar dan Ekspektasi Inflasi

- Pedagang menaikkan harga lebih awal karena:
- Antisipasi gangguan pasokan musim hujan
- Isu kenaikan harga nasional
- Potensi penimbunan pada komoditas tertentu menjelang akhir tahun.

5. Keterbatasan Efektivitas Intervensi Pasar

6. Koordinasi dan Pemantauan TPID yang Perlu Diperkuat

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Disperindagkop dan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan (DKPP) Aceh jaya melaksanakan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar menjelang Maulid Nabi Besar Muhammad Saw.
2. DKPP kabupaten Aceh Jaya melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui SI GAM TAMPAN (Sistem Gampong Tahan Pangan) yaitu dengan menanam tanaman pangan dan hortikultura di pekarangannya masing-masing. Komoditas yang diprioritaskan ditanam di pekarangan adalah cabe merah keriting, cabe rawit, terong dan sayur-sayuran.
3. Melakukan pendampingan dan penyuluhan kepada kelompok tani (pertanian, peternakan dan perikanan) melalui tenaga penyuluh sebagai upaya pembinaan Dinas Pertanian agar petani tetap melaksanakan kegiatan budidaya dan meningkatkan produktivitas komoditasnya.
4. Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Jaya melakukan kegiatan monitoring ke kelompok tani secara berkala.
5. Dinas Pertanian dan DKPP Kabupaten Aceh Jaya membuat laporan estimasi produksi pertanian, peternakan dan perikanan secara mingguan.
6. DKPP turut menyusun data neraca pangan daerah, bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Aceh.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan pada Triwulan IV tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Disperindagkop dan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan (DKPP) Aceh jaya melaksanakan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar menjelang Maulid Nabi Besar Muhammad Saw.
2. DKPP kabupaten Aceh Jaya melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui SI GAM TAMPAN (Sistem Gampong Tahan Pangan) yaitu dengan menanam tanaman pangan dan hortikultura di pekarangannya masing-masing. Komoditas yang

diprioritaskan ditanam di pekarangan adalah cabe merah keriting, cabe rawit, terong dan sayur-sayuran.

3. Melakukan pendampingan dan penyuluhan kepada kelompok tani (pertanian, peternakan dan perikanan) melalui tenaga penyuluh sebagai upaya pembinaan Dinas Pertanian agar petani tetap melaksanakan kegiatan budidaya dan meningkatkan produktivitas komoditasnya.
4. Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Jaya melakukan kegiatan monitoring ke kelompok tani secara berkala.
5. Dinas Pertanian dan DKPP Kabupaten Aceh Jaya membuat laporan estimasi produksi pertanian, peternakan dan perikanan secara mingguan.
6. DKPP turut menyusun data neraca pangan daerah, bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Aceh.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Gerakan tanam di pekarangan harus terus ditingkatkan karena sangat membantu ketersediaan pangan khususnya komoditas cabe yang sering menjadi komoditas penyumbang inflasi di daerah kota Kabupaten Aceh Jaya. Hal ini karena konsumsi komoditas tersebut sangat tinggi di Kota Kabupaten Aceh Jaya.
2. Indikasi adanya ketidakseimbangan supply dan demand harus didukung oleh ketersediaan data neraca pangan secara berkala.
3. Perlu peningkatan kerjasama dan keterlibatan semua pihak terkait untuk pengendalian inflasi Kabupaten Aceh Jaya.

1. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah Kabupaten Aceh Jaya

Adapun Rekomendasi pengendalian dari yang diterangkan diatas antara lain dapat berupa :

1. Penguatan Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Pokok
 1. Mendorong peningkatan produksi lokal (padi, cabai, bawang, ikan) melalui: Bantuan benih unggul dan pupuk bersubsidi tepat sasaran dan optimalisasi lahan pertanian dan perikanan
 2. Penguatan **lumbung pangan desa** dan cadangan pangan pemerintah daerah
 3. Kerja sama antardaerah (KAD) untuk pasokan pangan saat produksi lokal menurun

2. Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar

Untuk menekan lonjakan harga musiman dan saat hari besar keagamaan.

1. Operasi pasar murah secara berkala bekerja sama dengan Bulog dan Distribusi dan BUMD
2. Penetapan jadwal operasi pasar menjelang Ramadhan, Idul Fitri dan Akhir Tahun.

3. Perbaikan Distribusi dan Infrastruktur Logistik

Aceh Jaya memiliki tantangan geografis dan distribusi. Maka direkomendasikan kebijakan dengan perbaikan akses jalan ke sentra produksi dan pasar, Fasilitas transportasi distribusi hasil pertanian dan perikanan dan Pengembangan pasar desa dan pasar digital untuk mempersingkat rantai distribusi.

4. Penguatan Peran TPID Kabupaten Aceh Jaya

Koordinasi kebijakan menjadi kunci keberhasilan dengan Rekomendasi kebijakan dengan Rapat TPID rutin berbasis data inflasi terkini, Penyusunan **early warning system** inflasi daerah dan Sinkronisasi kebijakan OPD terkait (perdagangan, pertanian, perhubungan, sosial)

5. Pengendalian Ekspektasi Inflasi Masyarakat

Persepsi masyarakat dapat memicu inflasi. **Rekomendasi kebijakan dengan** Publikasi rutin harga bahan **pokok** melalui Media sosial pemerintah Papan informasi pasar Edukasi masyarakat agar tidak melakukan panic buying dan Transparansi kebijakan harga dan stok pangan

6. Penguatan Pasar Tradisional dan UMKM

Revitalisasi pasar tradisional agar distribusi lebih efisien. Fasilitas UMKM pangan lokal (pengolahan hasil tani dan ikan) untuk meningkatkan nilai tambah. Akses pembiayaan mikro dengan bunga rendah.

7. Kebijakan Pendukung Fiskal Daerah

Sinkronisasi APBK dengan program pengendalian inflasi. Alokasi anggaran responsif inflasi (inflation buffer fund). Insentif bagi pelaku usaha yang menjaga stabilitas harga.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Adapun Rekomendasi pengendalian dari yang diterangkan diatas antara lain dapat berupa

1. Penguatan Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Pokok

- Mendorong peningkatan produksi lokal (padi, cabai, bawang, ikan) melalui: Bantuan benih unggul dan pupuk bersubsidi tepat sasaran dan optimalisasi lahan pertanian dan perikanan
- Penguatan lumbung pangan desa dan cadangan pangan pemerintah daerah
- Kerja sama antardaerah (KAD) untuk pasokan pangan saat produksi lokal menurun

2. Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar

Untuk menekan lonjakan harga musiman dan saat hari besar keagamaan.

- Operasi pasar murah secara berkala bekerja sama dengan Bulog dan Distribusi dan BUMD
- Penetapan jadwal operasi pasar menjelang Ramadhan, Idul Fitri dan Akhir Tahun.
- Perbaikan Distribusi dan Infrastruktur Logistik

3. Perbaikan Distribusi dan Infrastruktur Logistik

Aceh Jaya memiliki tantangan geografis dan distribusi. Maka direkomendasikan kebijakan dengan perbaikan akses jalan ke sentra produksi dan pasar, Fasilitas transportasi distribusi hasil pertanian dan perikanan dan Pengembangan pasar desa dan pasar digital untuk mempersingkat rantai distribusi.

4. Penguatan Peran TPID Kabupaten Aceh Jaya

Koordinasi kebijakan menjadi kunci keberhasilan dengan Rekomendasi kebijakan dengan Rapat TPID rutin berbasis data inflasi terkini, Penyusunan early warning system inflasi daerah dan Sinkronisasi kebijakan OPD terkait (perdagangan, pertanian, perhubungan, sosial)

5. Pengendalian Ekspektasi Inflasi Masyarakat

Persepsi masyarakat dapat memicu inflasi. Rekomendasi kebijakan dengan Publikasi rutin harga bahan pokok melalui Media sosial pemerintah Papan informasi pasar Edukasi masyarakat agar tidak melakukan panic buying dan Transparansi kebijakan harga dan stok pangan

6. Penguatan Pasar Tradisional dan UMKM

Revitalisasi pasar tradisional agar distribusi lebih efisien. Fasilitas UMKM pangan lokal (pengolahan hasil tani dan ikan) untuk meningkatkan nilai tambah. Akses pembiayaan mikro dengan bunga rendah.

7. Kebijakan Pendukung Fiskal Daerah

Sinkronisasi APBD dengan program pengendalian inflasi. Alokasi anggaran responsif inflasi (inflation buffer fund). Insentif bagi pelaku usaha yang menjaga stabilitas harga.